

Pelaporan EITI 2014
Laporan EITI 2014 kepada Tim
Pelaksana

20 Februari 2017

Agenda

1 Laporan Kontekstual

2 Laporan Rekonsiliasi

3 Q & A

Laporan Kontekstual



Outline Laporan Kontekstual (1/7)

6. Badan Usaha Milik Negara

Bab ini menguraikan sinergi antara BUMN dan pemerintah, khususnya untuk meningkatkan performa BUMN dan mendorong pelaksanaan kebijakan pemerintah

95%

4. Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia

Bab ini menguraikan informasi terkini mengenai potensi sumber daya ekstraktif Indonesia dan proyek-proyek signifikan serta tantangan industri

95%

2. Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia

Bab ini memaparkan faktor regulasi, peranan pemerintah pusat dan daerah serta usaha perbaikan yang dilakukan di industri ekstraktif

95%

7. Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Sosial

Bab ini menguraikan kewajiban perusahaan di industri ekstraktif untuk menjaga lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat sekitar

95%

5. Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Bab ini memaparkan kebijakan fiskal, sistem anggaran nasional dan pengawasan penggunaan yang terkait industri ekstraktif

90%

3. Proses Perizinan, Penetapan Wilayah Kerja Migas dan Wilayah Pertambangan Minerba, dan Sistem Kontrak

Bab ini menguraikan tentang pemberian izin dan penetapan wilayah, sistem kontrak yang berlaku, *cadastral information* dan *beneficial ownership*

95%

1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Bab ini menggambarkan mengenai latar belakang dilakukannya pelaporan EITI, khususnya di Indonesia dan regulasi yang mendasari pelaksanaan pelaporan

95%



Outline Laporan Kontekstual (2/7)

No				Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014	Status
1				Pendahuluan dan Latar Belakang			
	1.1			Pendahuluan			
	1.2			Latar Belakang			
	1.2.1			Cakupan EITI di Indonesia			Masih memerlukan penyesuaian terkait dengan konversi Bahasa Inggris di tabel
	1.2.2			Implementasi EITI di Indonesia			
	1.2.3			Standar EITI 2016			
	1.2.4			Kerangka Hukum EITI di Indonesia		Poin C.2	
2				Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia			
	2.1			Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba)	2.1 Legal framework and fiscal regime		Perlu penambahan tabel milestone capaian UU 22 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, termasuk didalamnya penyiapan hirarki peraturan perundang undangan
	2.1.1			Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.2	
	2.1.2			Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Mineral dan Batubara	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.2	
	2.1.3			Regulasi dan Peraturan Atas Sumber Daya Yang Terkait Dengan Industri Ekstraktif	2.1 Legal framework and fiscal regime		

Outline Laporan Kontekstual (3/7)

No				Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014	Status
	2.2			Tugas, Peran, dan Tanggung Jawab dari Instansi Pemerintah yang Terkait Dengan Industri Ekstraktif	2.1 Legal framework and fiscal regime		Perlu penambahan grafik EITI Scoping Study 2014 terkait dengan Kementerian/ Lembaga yang terlibat pada proses minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba)
		2.2.1		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.1 Legal framework and fiscal regime		
			2.2.1.1	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas)	2.1 Legal framework and fiscal regime		
			2.2.1.2	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba)	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.1	
			2.2.1.3	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	2.1 Legal framework and fiscal regime		
		2.2.2		Kementerian Keuangan	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.1	
			2.2.2.1	Direktorat Jenderal Anggaran	2.1 Legal framework and fiscal regime		
			2.2.2.2	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	2.1 Legal framework and fiscal regime		
			2.2.2.3	Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)	2.1 Legal framework and fiscal regime		
			2.2.2.4	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dtijen Perbendaharaan)	2.1 Legal framework and fiscal regime		
			2.2.2.5	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Ditjen Kekayaan Negara)	2.1 Legal framework and fiscal regime		
		2.2.3		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.1 Legal framework and fiscal regime		
		2.2.4		Pemerintah Daerah	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.4	

Outline Laporan Kontekstual (4/7)

No			Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014	Status
2.3			Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Sedang Berjalan Terkait Industri Ekstraktif	2.1 Legal framework and fiscal regime		
	2.3.1		Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola Pada Sektor Migas	2.1 Legal framework and fiscal regime		Perlu penambahan tabel prioritas kerja Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas
	2.3.2		Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola Pada Sektor Minerba	2.1 Legal framework and fiscal regime		
	2.3.3		Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Mempengaruhi Industri Ekstraktif	2.1 Legal framework and fiscal regime		
3			Proses Perizinan, Penetapan Wilayah Kerja Migas dan Wilayah Pertambangan Minerba, dan Sistem Kontrak			
3.1			Proses Penetapan dan Tender Wilayah Kerja Migas	2.2 License allocations		Perlu penyesuaian tabel alur proses izin, WK dan WIPM
	3.1.1		Penetapan Wilayah Kerja (WK)	2.2 License allocations	Poin C.9	
	3.1.2		Prosedur Lelang WK	2.2 License allocations		
	3.1.3		Penawaran WK pada tahun 2014 - 2016	2.2 License allocations	Poin C.10	
3.2			Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba	2.2 License allocations		
	3.2.1		Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan	2.2 License allocations	Poin C.9	Perlu penambahan tabel yang menggambarkan kedudukan IUP, IUPK, IUP Operasi dan Produksi, IUP eksplorasi
		3.2.1.1	Penetapan Wilayah Pertambangan	2.2 License allocations		
		3.2.1.2	Penetapan Wilayah Pertambangan Tahun 2014 - 2016	2.2 License allocations	Poin C.10	
		3.2.1.3	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	2.2 License allocations		
		3.2.1.4	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Tahun 2014 - 2016	2.2 License allocations	Poin C.10	
	3.2.2		Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	2.2 License allocations		
	3.2.3		Penataan Penerbitan IUP	2.2 License allocations		
	3.2.4		Pengalihan Kontrak dan IUP	2.2 License allocations		

Outline Laporan Kontekstual (5/7)

No			Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014	Status
3.3			Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif	2.2 License allocations		
	3.3.1		Kontrak yang Berlaku di Sektor Pertambangan Migas	2.2 License allocations		
	3.3.2		Kontrak Bagi Hasil yang Habis Masa Kontraknya	2.2 License allocations		
	3.3.3		Pengalihan <i>Participating Interest</i> (PI)	2.2 License allocations		
	3.3.4		Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba	2.2 License allocations		
3.4			Pengungkapan Kontrak (Contract Disclosure)	2.4 Contracts		
	3.4.1		Regulasi yang Mengatur Pengungkapan Kontrak	2.4 Contracts		
	3.4.2		Kasus Legal tentang Permintaan Salinan Kontrak Industri Ekstraktif	2.4 Contracts		
3.5			Informasi Kadaster (Cadastral Information)	2.3 Register of licenses		
	3.5.1		Sektor Pertambangan Migas	2.3 Register of licenses		
	3.5.2		Sektor Pertambangan Minerba	2.3 Register of licenses		
3.6			Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownerships)	2.5 Beneficial ownerships	Poin C.10	
4			Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia			
4.1			Industri ekstraktif di Indonesia dalam konteks global		Poin C.4	
4.2			Kondisi Terkini Industri Migas di Indonesia			
	4.2.1		Potensi Sumberdaya dan Cadangan Migas	3.1 Exploration	Poin C.5	Perlu ditambahkan peta sebaran cadangan migas Indonesia
	4.2.2		Kegiatan Eksplorasi Migas yang Signifikan	3.1 Exploration	Poin C.3	
	4.2.3		Tantangan dan isu terkini industri Migas	3.1 Exploration		

Outline Laporan Kontekstual (6/7)

No			Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014	Status
4.3			Kondisi Terkini Industri pertambangan minerba di Indonesia			
	4.3.1		Potensi Sumberdaya dan Cadangan Batubara	3.1 Exploration	Poin C.5	Perlu ditambahkan peta sebaran cadangan batubara dan mineral logam Indonesia
	4.3.2		Potensi Sumberdaya dan Cadangan Mineral	3.1 Exploration	Poin C.5	
	4.3.3		Kegiatan Eksplorasi Minerba yang signifikan	3.1 Exploration	Poin C.3	
	4.3.4		Tantangan dan isu terkini industri pertambangan Minerba	3.1 Exploration		
5			Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif			
5.1			Kebijakan fiskal Atas Pengelolaan Penerimaan Industri Ekstraktif	5.1 Distribution of extractive industry revenues		
	5.1.1		Kebijakan fiskal pada sektor migas	5.1 Distribution of extractive industry revenues		Masih perlu di tambahkan informasi terkait dengan kebijakan fiskal
	5.1.2		Kebijakan fiskal pada sektor minerba	5.1 Distribution of extractive industry revenues		
5.2			Proses perencanaan, penganggaran dan audit	5.3 Revenue management and expenditures		Perlu penjelasan lebih lanjut terkait dengan proses perencanaan, anggaran dan audit
	5.2.1		Sistem Penganggaran Nasional Terkait Industri Ekstraktif	5.3 Revenue management and expenditures		
	5.2.2		Sistem Pengawasan Penggunaan Anggaran Nasional Pada Industri Ekstraktif	5.3 Revenue management and expenditures		

Outline Laporan Kontekstual (7/7)

No				Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014	Status
6				Badan Usaha Milik Negara (BUMN)			
6.1				Hubungan BUMN dan Pemerintah	2.6 State participation	Poin C.6	Perlu satu table terkait posisi BUMN Energi
6.2				PT Pertamina (Persero)	2.6 State participation	Poin C.6	
6.3				PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2.6 State participation	Poin C.6	
6.4				PT Bukit Asam (Persero) Tbk	2.6 State participation	Poin C.6	
6.5				PT Timah (Persero) Tbk	2.6 State participation	Poin C.6	
7				Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial			
7.1				Pertambangan migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)	6.1 Social expenditures by extractive companies		Tidak ada perubahan yang signifikan
7.2				Pertambangan minerba: jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang	6.1 Social expenditures by extractive companies		
7.3				Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)	6.1 Social expenditures by extractive companies		

Laporan Rekonsiliasi



Daftar perusahaan migas dan minerba yang tidak melapor

Perusahaan Migas

Alasan	Jumlah perusahaan	Jenis Perusahaan
Pengalihan kepemilikan	1	Mitra
Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	9	Mitra
TOTAL	10	

Perusahaan Minerba

Alasan	Jumlah perusahaan	Jenis Perusahaan
Berganti kepemilikan	1	IUP Mineral
Enggan Melapor	2	IUP Mineral (1) IUP Batubara (1)
Melebihi tenggat waktu	19	IUP Batubara (17) PKP2B (2)
Tidak ada tanggapan	14	IUP Mineral (1) IUP Batubara (12) KK Mineral (1)
Tidak tersambung	10	IUP Batubara (9) IUP Mineral (1)
TOTAL	46	

Daftar perusahaan migas dan minerba yang tidak melapor

Perusahaan Migas

No	Nama perusahaan	Alasan tidak melapor	Laporan DJA (C&D Tax)
1	KNOC Sumatra, Ltd.	Pengalihan kepemilikan	7,193
2	PT Bumi Siak Pusako	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	12,003
3	PT Imbang Tata Alam	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	251
4	PT Kencana Surya Perkasa	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
5	PT Petross Petroleum Production	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
6	GULF Petroleum Investment Co.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
7	LION International Investment Ltd.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
8	Fuel-X	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
9	PT Petronusa Bumibakti	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
10	International Mineral Resources Inc.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
TOTAL PERUSAHAAN MIGAS – PARTNER YANG TIDAK MELAPOR			19,447
TOTAL PENERIMAAN			6,894,810
PERSENTASE			0.28%

Perusahaan Minerba

No	Nama perusahaan	Royalti dan PHT (2014)	No	Nama perusahaan	Royalti dan PHT (2014)
1	PT Alam Jaya Barapratama	21,179,063,141.00	24	PT Kayan Putra Utama Coal	330,502,019,315.55
2	PT Aman Toebillah Putra	24,128,750,670.00	25	PT Kutai Energi	25,954,847,242.35
3	PT Amanah Anugerah Adi Mulia	36,108,096,205.00	26	PT Lembuswana Perkasa	74,441,329,692.40
4	PT Bara Alam Utama	52,373,861,211.36	27	KUD Makmur	450,740,000.00
5	PT Bara Jaya Energi	1,202,448,291.61	28	PT Manambang Muara Enim	24,099,765,751.12
6	PT Bara Jaya Utama	109,573,158,640.64	29	PT Meares Soputan Mining	20,573,634,134.00
7	PT Bara Kumala Sakti	116,071,581,429.25	30	PT Muara Alam Sejahtera	48,013,052,137.26
8	PT Baramega Citra Mulia Persada	693,646,781.00	31	PT Multi Sarana Avindo	142,241,442,858.34
9	PT Belitung Industri Sejahtera	30,919,050,714.00	32	PT Pancaran Surya Abadi	25,835,722,365.00
10	PT Beringin Jaya Abadi	73,086,684,990.79	33	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	176,434,302,439.25
11	PT Bhumi Rantau Energi	95,694,463,664.37	34	PT Pipit Mutiara Jaya	107,897,989,144.86
12	PT Binamitra Sumberarta	31,755,728,043.43	35	PT Raja Kutai Baru Makmur	24,584,369,216.05
13	PT Cahaya Energi Mandiri	75,977,448,400.44	36	PT Rinjani Kartanegara	65,637,722,361.49
14	CV Energi Bumi Kartanegara	402,161,735.00	37	PT Senamas Energindo Mineral	26,913,854,284.00
15	PT Energy Cahaya Industritama	62,048,942,134.00	38	CV Serumpun Sehalai	24,703,591,463.81
16	CV Fazar Utama	40,234,117,134.31	39	PT Sungai Berlian Bhakti	33,287,627,655.40
17	PT Ferto Rejang	29,865,170,687.00	40	PT Supra Bara Energi	32,931,488,617.00
18	KUD Gajah Mada	1,331,752,013.00	41	PT Surya Sakti Darma Kencana	23,619,215,903.00
19	PT Globalindo Inti Energi	31,860,419,934.98	42	PT Tantama Perkasa	19,225,419,217.95
20	PT Indoasia Cemerlang	51,903,705,005.00	43	PT Tinindo Inter Nusa	27,262,899,502.00
21	PT Injatama	63,836,806,906.00	44	PT Tunas Inti Abadi	126,991,885,354.26
22	PT Kalimantan Energi Lestari	235,502,553,275.78	45	CV Venus Inti Perkasa	21,691,599,221.25
23	PT Kaltim Jaya Bara	23,690,758,239.09	46	PT Welarco Subur Jaya	40,389,154,948.02
TOTAL					2,653,124,042,071.41
TOTAL PENERIMAAN					34,060,670,604,506.30
PERSENTASE					7.79%

Penerimaan negara yang direkonsiliasi untuk perusahaan migas

Jenis penerimaan	KKKS	SKK Migas	Ditjen Anggaran	Selisih	Selisih (%)
Government lifting minyak (volume Barel)	151,216,887	151,216,888		1	-
Government lifting gas (volume MSCF)	588,281,979	588,283,909		1,930	0 ¹
Government lifting minyak & gas (USD)		18,502,508	21,206,206	(6,503)	0 ²
Over/(Under) lifting minyak & gas (USD)	-441,191	-441,189		2	-
Corporate & Dividend Tax	7,330,153		6,894,810	-435,343	(5.9) ³

¹⁾ Pengisian formulir pelaporan belum berdasarkan FQR yang sudah final

²⁾ Nilai Ditjen Anggaran termasuk premium penjualan minyak

³⁾ Sebagian besar selisih masih menunggu klarifikasi dari KKKS

Penerimaan negara yang direkonsiliasi untuk perusahaan minerba

Jenis penerimaan	Entitas Pelapor	Ditjen Minerba	Ditjen Pajak	Ditjen Anggaran	KAI	Selisih	Selisih (%)
Royalti (Rupiah)	1,668,147,783,150	1,820,907,330,674				152,759,547,524	9.16 ¹
Royalti (USD)	965,507,085	999,793,968				34,286,883	3.55 ¹
Penjualan Hasil Tambang (Rupiah)	1,533,739,073,904	1,472,306,628,541				(61,432,445,363)	-4.01 ¹
Penjualan Hasil Tambang (USD)	1,156,689,867	1,207,070,754				50,380,887	4.36 ¹
PPh Badan (Pasal 25 dan 29) (Rupiah)	2,187,032,937,842		2,091,786,933,639			(95,246,004,203)	-4.36 ²
PPh Badan (Pasal 25 dan 29) (USD)	887,246,879		903,957,766			16,710,887	1.88 ²
Dividen kepada pemerintah (Rupiah)	936,197,613,815			936,197,613,815		-	0
Fee transportasi kepada BUMN (Rupiah)	1,528,998,980,733				1,522,879,327,870	6,119,652,863	(7) ³
Fee transportasi kepada BUMN (USD)	65,807,148				65,807,151	2.85	0

¹) Terdapat kesalahan alokasi pada royalti dan PHT, pencatatan tidak berdasarkan cash basis, tidak tercatat pada Ditjen Minerba (entitas memiliki bukti setor)

²) Pencatatan tidak berdasarkan cash basis, tidak tercatat pada DJP (entitas memiliki bukti setor)

³) Pencatatan PT KAI menggunakan tanggal dan nilai invoice, sedangkan PTBA menggunakan tanggal pembayaran

Penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi untuk perusahaan migas

No	Item pelaporan	Nilai dalam IDR (dalam juta rupiah)	Nilai dalam USD (dalam ribuan USD)
1	Pajak Bumi dan Bangunan (juta Rupiah)	16,782,727	
2	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (juta Rupiah)	56,145	
3	Pajak Pertambahan Nilai (juta Rupiah)	12,184,750	
4	CSR (dalam ribuan USD) :		
	a. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan		33
	b. Pemberdayaan Masyarakat		1,032,283
	c. Pelayanan Masyarakat		1,493,950
	d. Peningkatan Pendidikan		3,268
	e. Pengembangan Infrastruktur		1,150,041

Penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi untuk perusahaan minerba

No	Item pelaporan	Nilai dalam IDR	Nilai dalam USD	Nilai dalam Ton
1	Iuran Tetap	24,476,704,762	5,718,085	-
2	Pajak Bumi dan Bangunan	449,787,185,143	-	-
3	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	744,469,109,068	48,333,431	-
4	Pembayaran Langsung ke Pemda	303,342,499,993	356,580	-
5	CSR			
	a. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan	707,932,130	-	-
	b. Pemberdayaan Masyarakat	84,242,903,161	13,324,399	-
	c. Pelayanan Masyarakat	166,738,100,717	71,877,610	-
	d. Peningkatan Pendidikan	21,421,521,847	272,384	-
	e. Pengembangan infrastruktur	48,812,703,642	11,783,899	-
6	Penyediaan Infrastruktur	43,416,503,320	31,690,245	-
7	Iuran Penggunaan Kawasan Hutan	565,955,363,629	-	-
8	DMO			43,294,785

Gambaran Penerimaan Daerah

Sample penerimaan daerah untuk Laporan EITI 2014 adalah:

1. Kalimantan Timur,
2. Jawa Timur
3. Riau.

Secara garis besar penerimaan negara untuk tahun 2014 dengan perbandingan tahun 2013, sbb:

Dalam jutaan rupiah

Jenis Penerimaan	Kalimantan Timur			Jawa Timur			Riau		
	2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%
DBH - Minyak	767,139	499,084	-35%	231,260	233,483	1%	2,210,039	2,659,665	20%
DBH - Gas	2,245,642	1,337,778	-40%	27,318	62,088	127%	698	2,869	311%
PBB - Minyak dan Gas Bumi	-	312,557	-	-	-	-	356,630	405,608	14%
DBH – Royalti	1,359,943	1,155,417	-15%	-	-	-	4,076	12,333	203%
DBH - Iuran Tetap/Land Rent	9,504	17,579	85%	-	-	-	752	1,630	117%
PBB - Mineral dan Batubara	-	25,792	-	-	-	-	322	1,937	502%
PBB P3	475,969		-100%	-	-	-	-		
Penerimaan Asli Daerah (PAD)	84,961	73,469	-14%	-	-	-	725,616	836,167	15%
TOTAL	4,979,158	3,421,676	-31%	258,578	295,572	14%	3,298,133	3,920,209	19%

Temuan dan Rekomendasi



1 Belum ada standarisasi pengukuran dampak dari pengeluaran terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan

Latar belakang

Memenuhi standar EITI 2016 :

- 6.1- Social expenditure by extractive companies
- 6.3-The contribution of the extractive sector to the economy

Observasi

Belum dapat dilakukan penilaian oleh stakeholders atas dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan perusahaan ekstraktif terhadap masyarakat di wilayah kerja

Implikasi

- IA mengidentifikasi jumlah pengeluaran perusahaan ekstraktif
- IA tidak dapat membuat analisa terkait dampaknya kepada masyarakat disekitarnya

Rekomendasi

- Pembuatan metode dan standar pengukuran dampak dari tj sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat
- Pembaharuan template Laporan Rekonsiliasi EITI

2 Belum dilakukannya pemutakhiran data perusahaan secara periodik khususnya minerba

Latar belakang

Penyusunan Laporan EITI Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2009 namun masih banyak data perusahaan minerba yang tidak akurat

Observasi

Pengiriman template Laporan EITI baik melalui surat dan atau email yang tidak sampai kepada perusahaan pelapor

Implikasi

- Alamat email yang tidak terdaftar
- IA mencari alamat, email, no. telepon perusahaan baik melalui sekretariat EITI, Ditjen Minerba, Pemda, situs online dan database perusahaan milik IA
- Sosialisasi dilakukan secara berulang kali
- Proses rekonsiliasi, klarifikasi dan Laporan Rekonsiliasi terlambat penyelesaiannya

Rekomendasi

- Sekretariat EITI selalu melakukan pemutakhiran data kontak perusahaan pelapor berdasarkan hasil akhir dari Laporan EITI

Temuan dan Rekomendasi



3 Pelaksanaan Penyusunan Laporan EITI sebaiknya tidak dilakukan pada periode penyusunan laporan tahunan perusahaan

Latar belakang

- Perusahaan mengalami kesulitan didalam memenuhi tenggat waktu pelaporan
- Adanya kewajiban pelaporan keuangan dan atau proses audit eksternal pada waktu yang bersamaan

Observasi

Terdapat beberapa keberatan perusahaan pelapor untuk menyampaikan laporan rekonsiliasi sesuai dengan tenggat waktu yang diminta

Implikasi

- Keterlambatan penyampaian formulir EITI untuk perusahaan yang menyebabkan tertundanya penyelesaian laporan rekonsiliasi EITI
- Sulitnya menemui nara sumber untuk melakukan klarifikasi

Rekomendasi

- Memperhitungkan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia untuk periode tahun berikutnya

4 Sample provinsi atas data DBH yang selalu sama

Latar belakang

Prinsip kekhasan suatu daerah yang sejalan dengan transparansi memerlukan sampel provinsi yang menyeluruh

Observasi

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sampel provinsi atas data DBH yang digunakan sama yaitu: Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Timur

Implikasi

- Kurang memberikan gambaran pembagian DBH secara nasional yang sejalan dengan kontribusi industri ekstraktif daerah tersebut

Rekomendasi

- Sekretariat EITI perlu mengkaji pemilihan sample provinsi yang berbeda setiap tahunnya atas data DBH untuk menggambarkan transparansi secara menyeluruh

Q & A





Terima Kasih

Ernst & Young

Advisory | Tax | Transactions | Assurance

About Ernst & Young

Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. Worldwide, our 212,000 people are united by our shared values and an unwavering commitment to quality. We make a difference by helping our people, our clients and our wider communities achieve their potential.

Ernst & Young refers to the global organization of member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients.

For more information about our organization, please visit www.ey.com/id.

© 2016. PT Ernst & Young Indonesia
All Rights Reserved.

